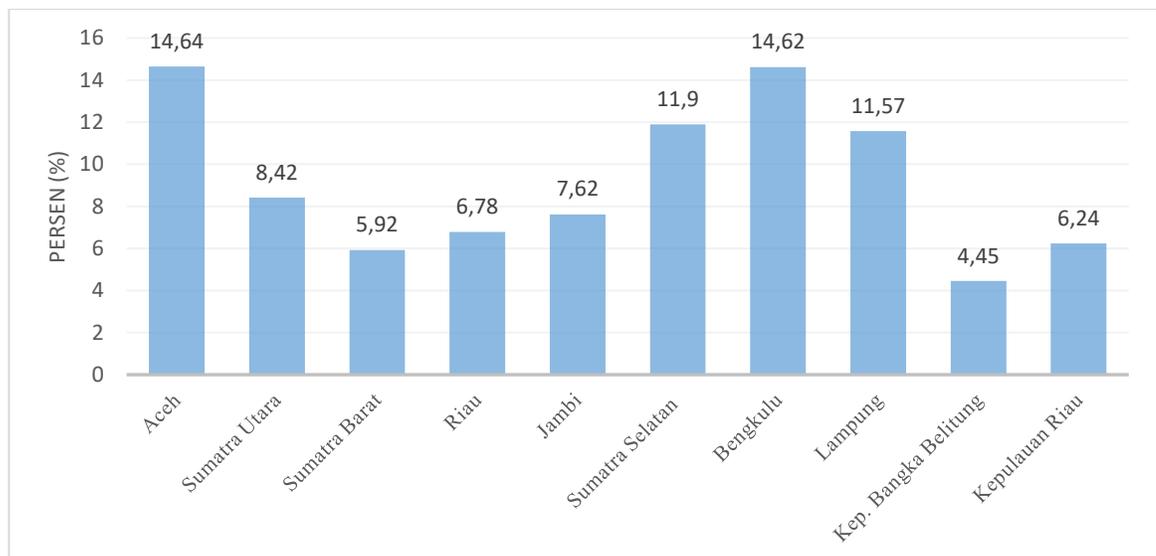


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

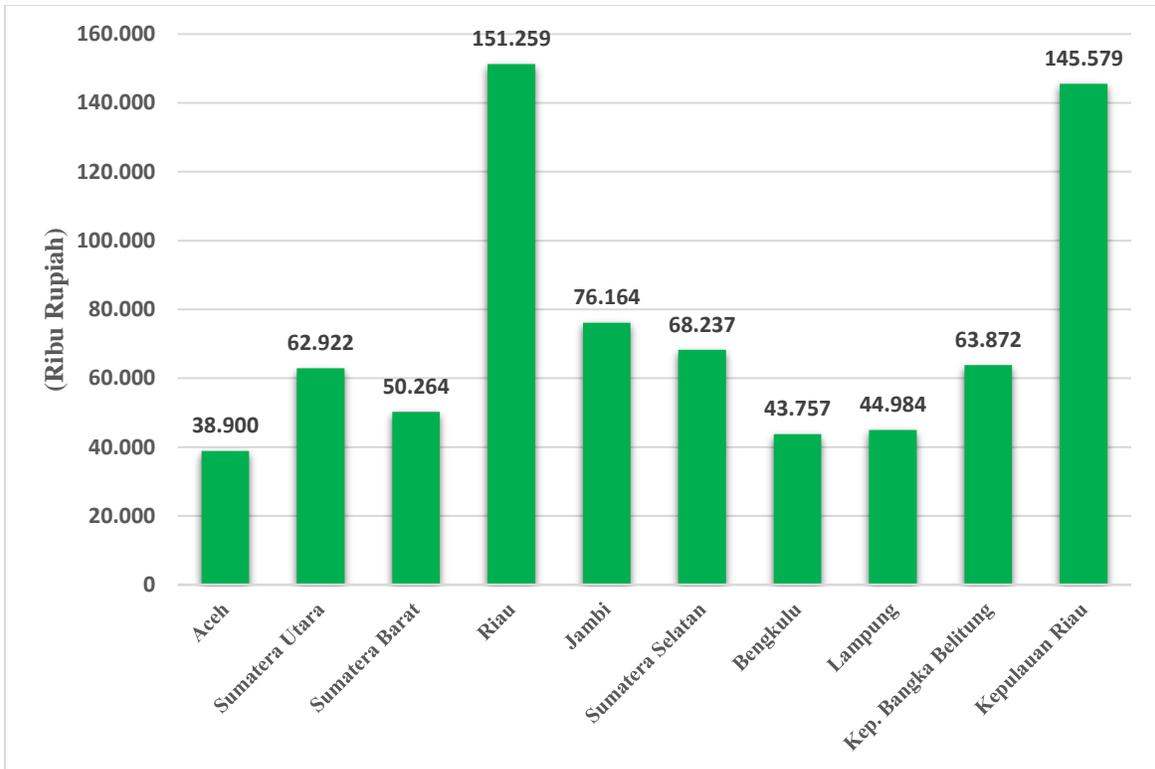
Kemiskinan di Pulau Sumatra merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi yang lambat, pengangguran tinggi, dan pendidikan rendah membuat banyak orang sulit mendapatkan penghidupan yang layak. Akses terbatas ke layanan kesehatan dan infrastruktur yang kurang memadai juga memperburuk kondisi ini. Rendahnya pendapatan per kapita dan ketimpangan ekonomi semakin memperparah masalah. Untuk mengatasi kemiskinan di Sumatra, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Warita et al., 2021).



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2024

**Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Provinsi - Provinsi di Pulau Sumatra (%)  
Tahun 2022**

Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Pulau Sumatra menunjukkan perbedaan yang menonjol antarprovinsi. Aceh tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dalam hal pengentasan kemiskinan. Faktor-faktor seperti rendahnya akses pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, dan infrastruktur yang kurang memadai berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan di Aceh. Upaya yang lebih terfokus diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang mendukung peningkatan ekonomi dan pendidikan. Sebaliknya, Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatra pada tahun 2022. Keberhasilan ini dapat diatribusikan pada pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Provinsi ini telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk pengembangan sektor pariwisata dan pertambangan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan masih ada untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan.

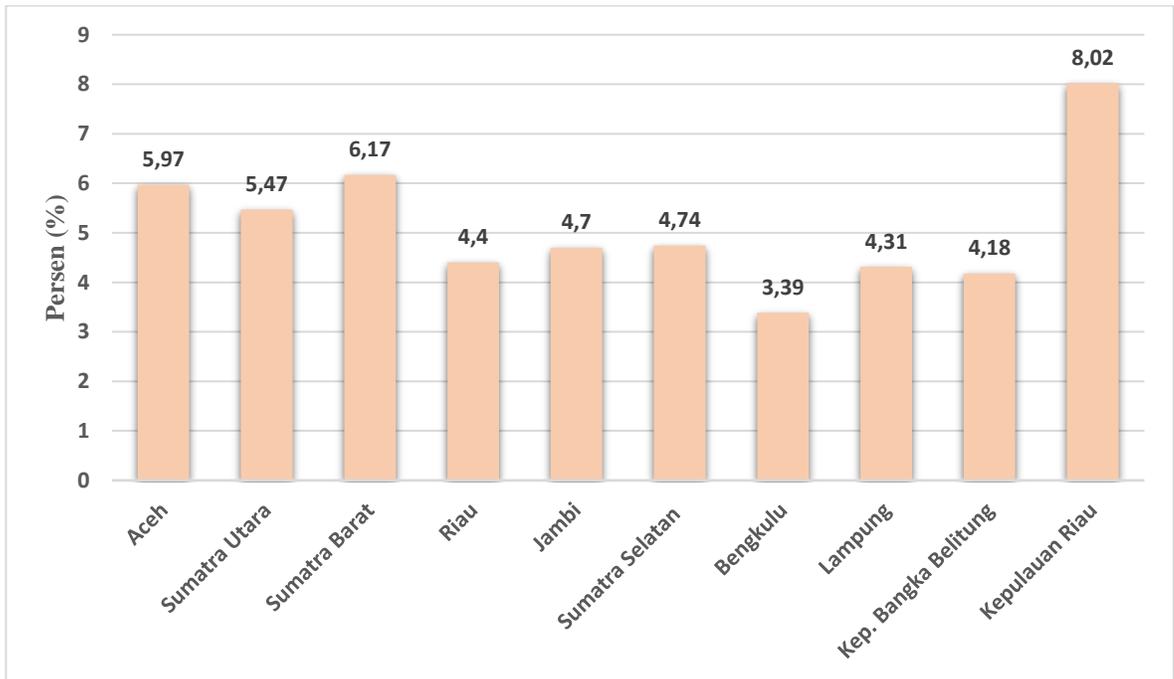


Sumber: BPS Nasional, Tahun 2024

**Gambar 1. 2 PDRB per Kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatra (Ribu Rupiah), Tahun 2022**

Gambar 1.2 merupakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam satuan rupiah yang menunjukkan perbedaan signifikan antara provinsi-provinsi di Pulau Sumatra. Provinsi Riau mencatatkan PDRB tertinggi yaitu sebesar 151.259, yang mencerminkan kekuatan ekonomi daerah tersebut, terutama di sektor sumber daya alam seperti minyak dan gas. Tingginya PDRB di Riau juga mencerminkan keberhasilan dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, menjadikannya sebagai salah satu pendorong utama bagi perekonomian regional. Sebaliknya, Aceh tercatat sebagai provinsi dengan PDRB terendah di Pulau Sumatra yaitu sebesar 38.900. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak dari konflik yang

berkepanjangan, kerusakan infrastruktur, serta tantangan dalam pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan. Rendahnya PDRB di Aceh menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mendorong investasi, memperkuat sektor-sektor ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2024

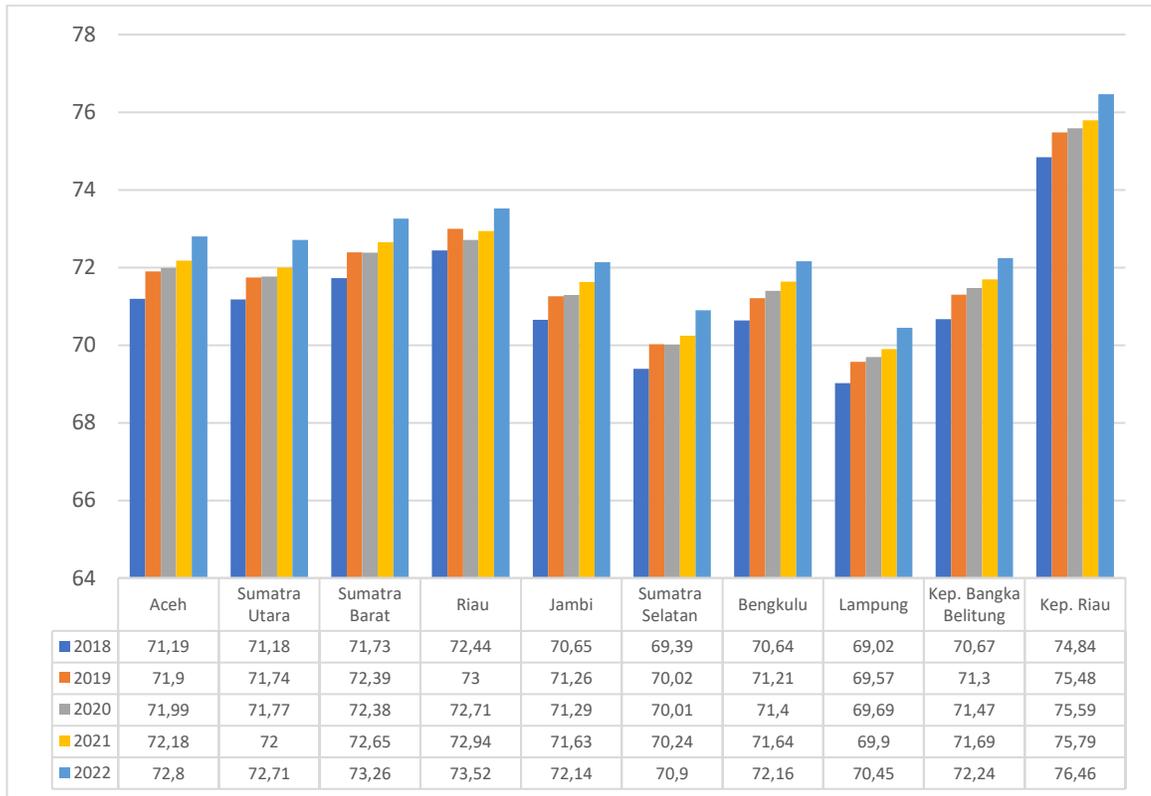
**Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatra, Tahun 2022**

Selain kemiskinan dan PDRB, masalah pengangguran turut menjadi perhatian yang cukup penting di Pulau Sumatra. Gambar 1.3 merupakan grafik yang menggambarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Sumatra pada tahun 2022. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa Kepulauan Riau mencatatkan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Pulau Sumatra. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan industri, serta keterbatasan lapangan kerja yang tersedia. Di sisi lain, provinsi Bengkulu menunjukkan tingkat

pengangguran terendah, yang mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Perbedaan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terarah untuk mengatasi pengangguran, terutama di provinsi-provinsi yang mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa upaya menurunkan tingkat pengangguran tidak hanya sebatas menciptakan lapangan kerja baru. Perlu adanya perhatian khusus pada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, indikator penting lainnya dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tantangan pembangunan suatu bangsa adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia, pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meskipun indeks pembangunan manusia Indonesia mengalami peningkatan, namun ranking pencapaiannya masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 2008, misalnya, ranking pencapaian IPM Indonesia adalah 111 dari 175 negara (UNDP, 2009). Rendahnya ranking IPM ini terutama terjadi di daerah Kabupaten dan Kota yang angka kemiskinannya masih tinggi. Bila kecenderungan ini berlanjut dimasa mendatang akan berpengaruh terhadap upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya perbaikan kehidupan rakyat miskin (World Bank, sejumlah komponen dasar kualitas hidup). HDI di hitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur pencapaian pembangunan di bidang

pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang di lihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak (BPS).



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2024

**Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi - Provinsi di Pulau Sumatra, Periode 2018-2022**

Gambar 1.4 merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode 2018-2022 di Pulau Sumatra yang menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarprovinsi. Kepulauan Riau menduduki posisi tertinggi selama lima tahun terakhir, mencerminkan kemajuan yang konsisten dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Keberhasilan ini didukung oleh inisiatif pembangunan yang efektif serta investasi dalam infrastruktur dan layanan publik, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, provinsi Lampung mencatatkan IPM terendah

dari tahun 2018 hingga 2021, dan tetap berada di posisi terendah pada tahun 2022. Rendahnya IPM di Lampung menunjukkan adanya tantangan serius dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan, yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan IPM, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dari pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan program-program yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sebagai ukuran kualitas hidup, HDI di bangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) (BPS).

Indeks pembangunan manusia didukung oleh tiga faktor utama yaitu pendidikan, kesehatan dan kelayakan ekonomi. Oleh karena itu, sangat wajar jika dalam usaha membangun bangsa lebih memperhatikan indeks pembangunan manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan memperluas lapangan kerja agar pengangguran dapat ditekan sehingga kelayakan hidup manusia secara ekonomi memenuhi standar.

Konsep HDI oleh UNDP telah mendapatkan popularitas sebagai pengukuran yang komprehensif sejak diperkenalkan secara global melalui laporan pembangunan manusia pertama tahun 1990 merupakan sebuah bentuk kritikan dan sekaligus perbaikan terhadap

penggunaan angka pendapatan per kapita sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat yang pada awalnya hanya memfokuskan pada aspek ekonomi saja, padahal disisi lain ada aspek yang juga perlu diperhatikan dalam mencapai kesejahteraan yaitu dengan mengukur aspek sosial seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat (Rochmawati, 2018). Pembangunan manusia adalah fokus tujuan dari pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam (Ahmad, 2000).

Keberadaan HDI yang ditawarkan oleh UNDP sebagai salah satu alat yang dapat di pakai untuk mengukur tingkat pembangunan manusia mungkin dapat menjadi indikator yang paling komprehensif, tetapi tidak sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Teori dan konsep yang mendasari untuk membangun HDI tidak didasarkan pada *maqashid syariah*. Untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, di mana teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif Islam.

I-HDI dihitung berdasarkan data yang menggambarkan kelima dimensi *maqashid syariah* tersebut. Untuk dimensi agama (*ad-dien*) indikator yang digunakan yaitu data angka kriminalitas. Dimensi jiwa (*an-nafs*) indikator yang di pakai yaitu data angka harapan hidup. Sementara itu, untuk dimensi intelektual (*al-'aql*) digunakan indikator yaitu data angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk dimensi keturunan (*an-nasl*) digunakan dua indikator yaitu data angka kelahiran total dan angka kematian bayi. Untuk dimensi harta (*al-maal*) maka digunakan gabungan dua indikator yaitu indikator kepemilikan harta oleh individu dan indikator distribusi pendapatan. Untuk indikator

kepemilikan atas harta data yang di pakai yaitu pengeluaran perkapita riil disesuaikan, untuk indikator distribusi pendapatan digunakan data indeks gini dan indeks kedalaman kemiskinan.

Maka untuk mengatasi kekurangan ini beberapa negara termasuk Indonesia mulai menggunakan pengukuran indeks pembangunan manusia sebagai alat ukur yang dikombinasikan dari tiga unsur penting dari sebuah kesejahteraan penduduk. Sehingga pencapaian pembangunan manusia tersebut ialah ditandai dengan tercapainya angka penduduk sehat dan berumur panjang, berpendidikan, dan akses sumberdaya yang dapat memenuhi standar hidup layak. Untuk mengukur ketiga hal tersebut, digunakan indeks berdasarkan tiga perhitungan yang kemudian dikenal dengan HDI.

Konsep pembangunan manusia yang dicirikan dengan peran manusia sebagai agen pembangunan mewajibkan penduduk suatu negara ataupun daerah memiliki peluang berumur panjang dan sehat, memiliki tingkat pendidikan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif (Nur Feriyanto, 2014).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap – tiap negara. Persoalan tentang pencapaian pembangunan sejauh ini telah menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi akan memiliki karakter yang komprehensif dan mencakup aspek moral, spiritual, dan material. Pengukuran HDI yang dianggap telah memenuhi dalam mengukur sebuah kesejahteraan suatu penduduk nyatanya masih memiliki kritikan. Kritikan tersebut mengenai basis ideologi dalam HDI yang bersifat egalitarian

(kecenderungan cara berpikir bahwa seluruh penduduk diperlakukan oleh pemerintah ataupun mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah) dan miskin terhadap pemikiran terkait teknologi merupakan kritikan terhadap HDI.

Sehingga konsep yang ditawarkan UNDP dalam mengukur tingkat pembangunan manusia dengan menggunakan HDI mungkin dapat menjadi indikator yang paling komprehensif, tetapi tidak sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Arah teori dan konsep yang mendasari dalam membangun HDI tidak didasarkan pada *Maqasid Syariah*. Oleh karena itu untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, di mana teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif Islam (Rocmawati, 2018).

Pengukuran I-HDI yang dibangun dari konsep *Maqasid Syariah* menurut Imam asy-Syatibi bahwa kebutuhan dasar manusia terdiri dari lima hal, yaitu *agama (dien)*, *jiwa (nafs)*, *intelektual ('aql)*, *keluarga dan keturunan (nasl)*, dan *material (māl)*. Kelima dimensi tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, Jika salah satu dari kebutuhan dasar manusia tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna. Keadilan dan kemaslahatan yang ditampilkan secara nyata dalam rupa indeks pembangunan manusia menjadi barometer seberapa kuat kualitas *syari'ah* dalam suatu agenda pembangunan ekonomi manusia berbasis hukum Islam (*Maqasid Syariah*). Padahal dalam ekonomi *Syari'ah* melingkupi kemaslahatan dan keadilan, dan hal tersebut erat kaitannya dengan pembangunan manusia yang ingin diwujudkan dalam *Maqasid Syariah* (P3EI, 2012).

Imam Al-Syatibi mengemukakan bahwa masalah hidup manusia terdiri dari lima dimensi: agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Kelima dimensi ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi secara tidak seimbang, maka kesejahteraan hidup tidak akan tercapai secara sempurna. (Dwi Lestari et al., 2024). *Islamic Human Development Index (I-HDI)* dapat digunakan sebagai alat ukur khususnya di negara-negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Munculnya konsep I-HDI dapat menentukan apakah agama Islam berpengaruh terhadap pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Objek HDI adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui perluasan produksi yang bermanfaat, peningkatan kualitas hidup, penyeimbangan pembangunan, pengembangan teknologi yang sejalan dengan kondisi negara-negara Muslim, dan pengurangan ketergantungan pada dunia luar dan integrasi yang lebih besar dari dunia Muslim (Rahim et al., 2021). Pembangunan dalam Islam merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik dan berkah, hal ini akan tercapai apabila pembangunan dilaksanakan berdasarkan keadilan, keseimbangan, dan ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata keberhasilan dari pencapaian materiil, namun pembangunan moral dan spiritual sangat penting dalam kemajuan pembangunan manusia (Dwi Lestari et al., 2024).

*Islamic Human Development Index* di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. *Pertama*, kesejahteraan non-material menjadi peran utama dalam pembentukan I-HDI. Aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup memiliki dampak yang lebih besar. Pemerintah perlu fokus pada kebijakan fiskal di bidang pendidikan dan

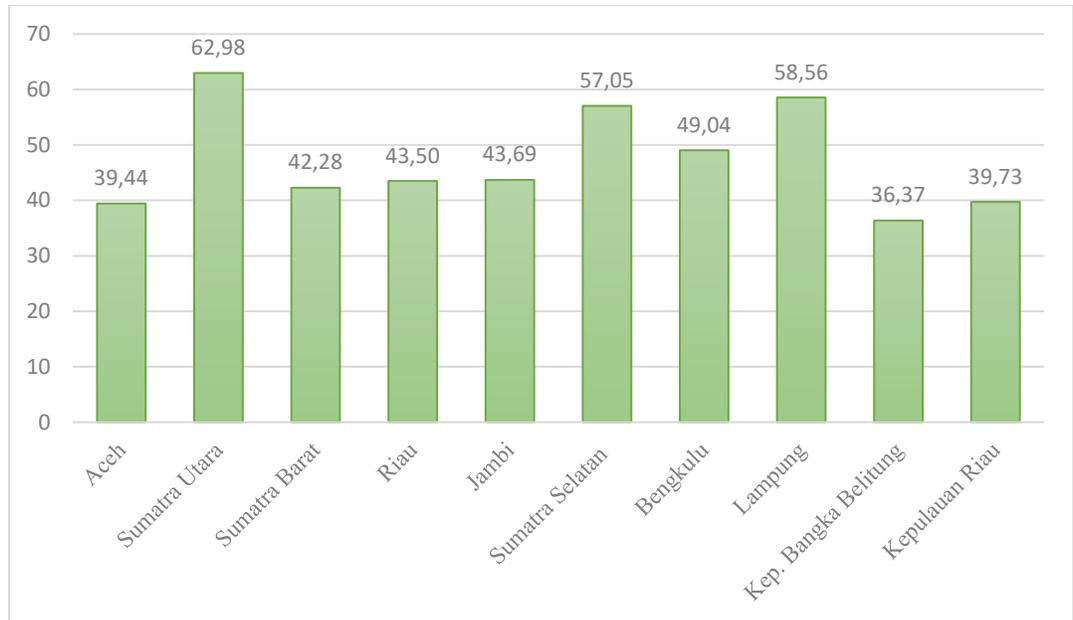
kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan turut berkontribusi pada peningkatan IHDI. Pertumbuhan ekonomi yang baik, mampu memperkuat sektor ekonomi di berbagai wilayah, yang kemudian mampu meningkatkan kesejahteraan material masyarakat. *Ketiga*, kemiskinan dan pengangguran juga berpengaruh terhadap IHDI dikarenakan mampu membatasi akses terhadap pendidikan dan kesehatan dan selanjutnya mampu menurunkan IHDI. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2019, IPM Indonesia mencapai 71,92 dan terus meningkat menjadi 72,29 pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat Indonesia secara umum. Perlu dicatat bahwa peningkatan IPM ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan sebagian Sumatra cenderung memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur. Kesenjangan ini mencerminkan tantangan pembangunan yang masih dihadapi Indonesia terutama dalam hal pemerataan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Dalam mengukur kesejahteraan umat Islam di Indonesia dan Sumatra, beberapa indikator dapat digunakan termasuk IPM dan Indeks Zakat Nasional.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia Sumatra juga mengalami peningkatan dari 70,73 pada tahun 2019 menjadi 71,07 pada tahun 2021. Meskipun masih di bawah rata-rata nasional, tren peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat Sumatra termasuk umat Islam yang menjadi mayoritas di wilayah ini.

*Islamic Human Development Index (I-HDI)* di Pulau Sumatra mengukur kualitas kehidupan manusia berdasarkan beberapa dimensi. Pada tahun 2023, dimensi tingkat harapan hidup Sumatra Utara mencapai 75,13 meningkat sebesar 0,62 (0,83%) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,51. Bayi yang lahir memiliki angka harapan hidup hingga 73,67 atau meningkat sebesar 0,28 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam dimensi pendidikan, panjang harapan sekolah untuk penduduk yang berusia 7 tahun meningkat sebesar 0,17 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 13,31 tahun menjadi 13,48 tahun. rata-rata lama sekolah untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,11 tahun, dari 9,71 menjadi 9,82 tahun pada 2023. Data tersebut dilakukan dengan menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. Dimensi lainnya adalah kesejahteraan material. Dimensi ini diukur dengan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun. pada tahun 2023, dimensi kesejahteraan hidup meningkat sebesar 201 ribu rupiah atau 1,85% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Badan Pusat Statistik, 2023).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, jumlah penduduk yang beragama Islam di Pulau Sumatra tergolong besar, yaitu mencapai 50.525.873 atau sekitar 97,2%. Berdasarkan data *Islamic Human Development Index (I-HDI)* pada tabel tersebut, (I-HDI) tertinggi terletak pada Provinsi Sumatra Utara dengan angka 9.810.473, kemudian diikuti oleh Provinsi Lampung dengan angka 8.675.884, dan Provinsi Sumatra Selatan dengan angka 8.030.200. Di sisi lain, tiga provinsi dengan I-HDI terendah adalah Provinsi Bengkulu dengan angka 1.953.891, diikuti dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka 1.248.691, dan kemudian Provinsi Kepulauan Riau dengan angka 1.530.708.



Sumber: Di Olah, Tahun 2024

### **Gambar 1. 5 I-HDI Provinsi - Provinsi di Pulau Sumatra, Tahun 2022**

Gambar 1.5 menunjukkan nilai Islamic Human Development Index tahun 2022 di Pulau Sumatra. Provinsi Sumatra Utara menduduki posisi dengan angka tertinggi pada tahun 2022. Angka yang diperoleh provinsi ini mencerminkan kemajuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh berbagai program dan inisiatif yang mendukung pembangunan manusia secara holistik, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai islami dalam meningkatkan kualitas hidup. Di sisi lain, Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai provinsi dengan I-HDI terendah di Pulau Sumatra. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut, termasuk dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan. Untuk memperbaiki nilai I-HDI, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan program-program yang berfokus pada peningkatan

kesejahteraan, serta memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia di Provinsi di Pulau Sumatra diharapkan akan meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti terjadi peningkatan dibidang pendidikan, kesehatan, dan kelayakan ekonomi yang memberikan dampak pada peningkatan produktivitas manusia. Apabila indeks pembangunan masih tergolong rendah, hal ini berarti provinsi tersebut masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Pengembangan dan implementasi ekonomi dalam perspektif Islam didasarkan pada Al syaria Islam yaitu Al Qur'an dan Hadist. Artinya bahwa dalam aktivitas ekonomi ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Dalam aktivitas ekonomi, ada tiga landasan yang mendasari aktivitas manusia di dunia ini termasuk aktivitas ekonomi (El-Diwanly. 2005) yaitu aqidah, syaria dan ahlak. Aqidah menyangkut dengan Iman dan keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa semua aktivitas ekonomi harus didasarkan kepada ke Imanan. Artinya, semakin tinggi ke Imanan seseorang akan semakin baik pula aktivitas dan kondisi ekonominya termasuk yang menyangkut kewajibannya seperti mengeluarkan zakat.

Zakat terdiri dari dua jenis yaitu zakat diri (*zakat fitrah*) dan zakat harta (*zakat mall*). *Zakat fitrah* merupakan pungutan wajib bagi setiap Muslim sebagai alat untuk pembersihan diri. Sedangkan zakat harta (*zakat mall*) sebagai pembersih harta atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*) Zakat yang dipungut oleh amil zakat di distribusikan kepada 8 *asnaf* (golongan) penerima zakat

(*mustahiq*) yaitu; fakir, miskin, fisabilillah, ibnussabil, amil, hambasahaya, gharim dan muallaf. Pada dasarnya tujuan utama penarikan dari Muzaki adalah upaya untuk pengendalian harta masyarakat agar mengalir (tidak menumpuk) menuju aktivitas investasi, dari pada tujuan pengumpulan dana untuk di distribusikan pada yang berhak (*mustahiq*).“Wahai Amr, sebaik-baik harta yang shaliha dalah milik orang shalih ” (HR Ahmad).

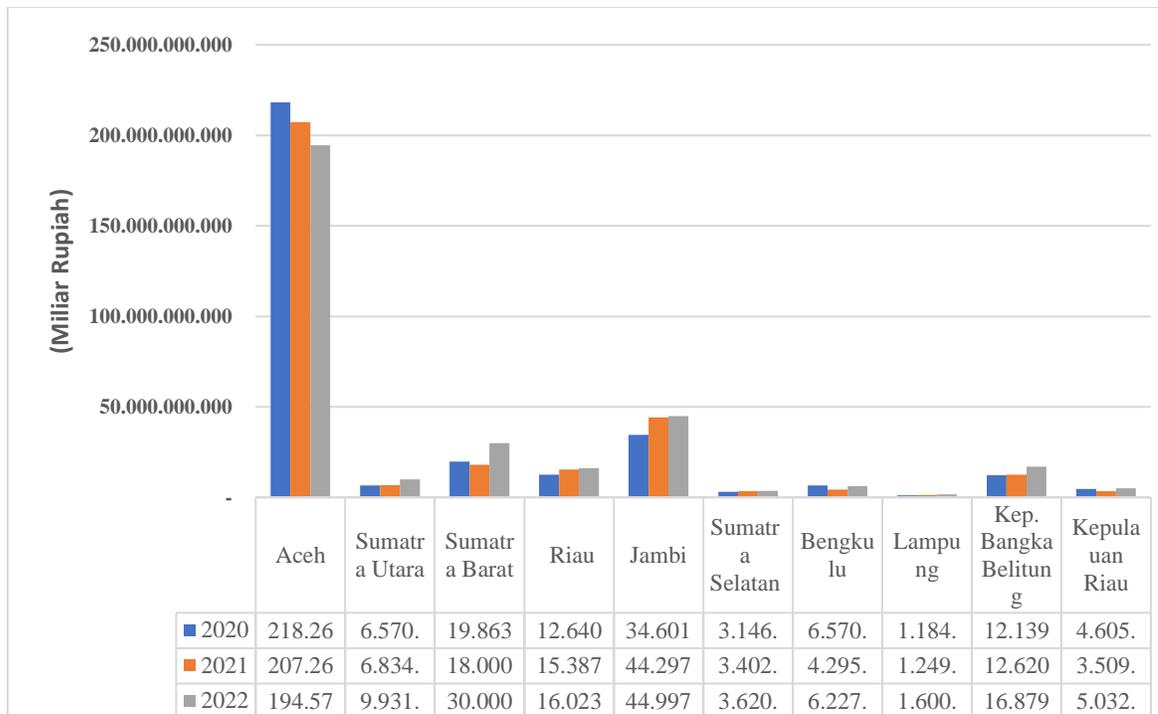
Zakat mempunyai tiga dimensi pokok dalam kehidupan Muslim yaitu dimensi spiritual, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi (Beik. 2010). Dalam dimensi spritual, zakat merupakan sarana ibadah dan penyucian jiwa melalui zakat fitrah dan penyucian harta melalui zakat mal seseorang. Dari sisi sosial, dengan zakat seseorang dapat meningkatkan produktivitasnya, karena zakat mendorong seseorang untuk memiliki etos kerja yang tinggi dalam upaya meningkatkan keyakinan dan kekayaannya agar dapat meningkatkan zakat dan inak sedakahnya. Dalam dimensi ekonomi, zakat memiliki dua konsep utama yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mekanisme *sharing* (distribusi) dalam perekonomian. Selain memiliki tiga dimensi tersebut, zakat juga memiliki hubungan positif dengan parameter pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Dengan adanya zakat, para msutahiq (fakir dan miskin) akan mendapatkan pembagian kekayaan yang berasal dari zakat yang diserahkan oleh muzaqi. Dengan adanya pendapatan (zakat) maka permintaan (*aggregate demand = AD*) akan meningkat. Dengan meningkatnya permintaan (AD), akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi (*aggregate supply = AS*) sehingga perekonomian akan semakin berkembang.

Dari hasil penelitian Pramanik (1993), diketahui bahwa zakat memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Data BAZNAS menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional meningkat dari Rp. 10,2 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp. 11,2 triliun pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga mencapai Rp.14,3 triliun pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi di kalangan umat Islam Indonesia untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Provinsi pulau Sumatra dengan jumlah penduduk hasil sensus 2022 berjumlah 51.927.988 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 50.525.873 jiwa atau 97,2 % merupakan penduduk yang beragama Islam (Sensus 2022). Sebagai provinsi yang berpenduduk mayoritas Muslim. Selama tahun 2012 – 2021 penerimaan zakat secara Nasional terus menunjukkan peningkatan yaitu dari Rp. 57,8 milyar pada tahun 2012 menjadi Rp.408,5 milyar pada tahun 2022. Dengan nilai zakat yang diterima Baznas pada tahun 2020 sebesar Rp.408,5 milyar tersebut, maka ini berarti bahwa masyarakat Muslim Provinsi di Pulau Sumatra potensi yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan zakat secara Nasional. Pengelolaan zakat di Sumatra juga menunjukkan tren positif. Beberapa provinsi di Sumatra seperti Sumatra Barat dan Aceh bahkan menjadi pelopor dalam mengintegrasikan zakat dengan sistem pemerintahan daerah. Laporan BAZNAS menunjukkan bahwa wilayah Sumatra memberikan kontribusi signifikan terhadap penghimpunan zakat nasional.

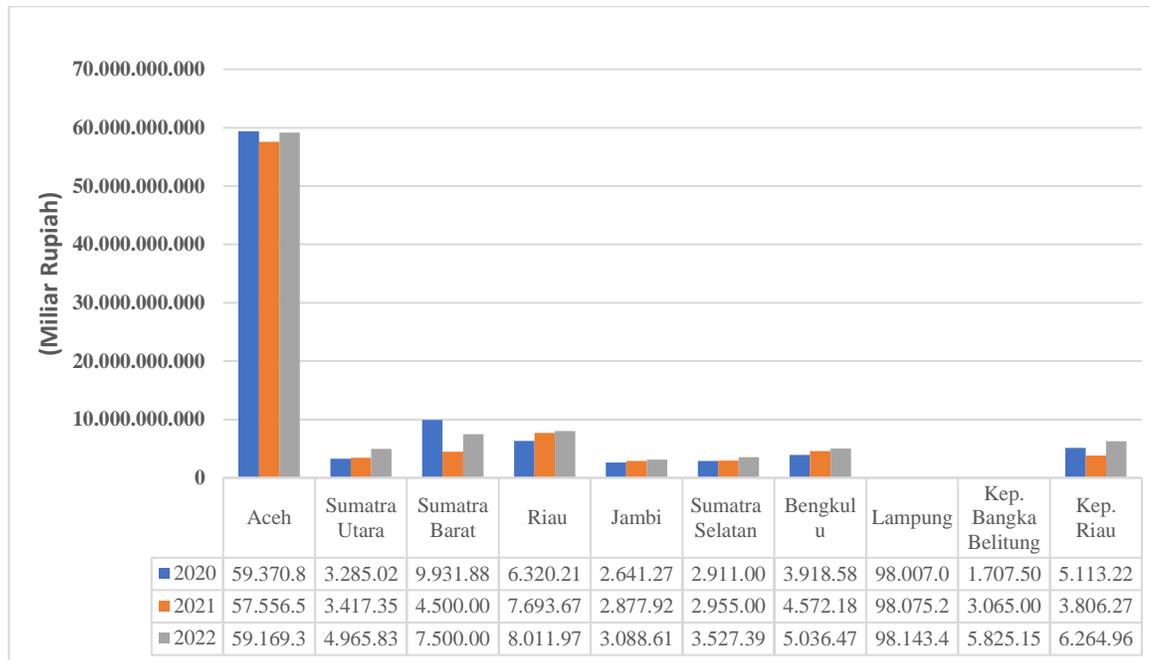


Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Tahun 2024

**Gambar 1. 6 Zakat Fitrah Provisi-Provisi di Pulau Sumatra, Tahun 2020-2022**

Gambar 1.6 merupakan grafik terkait distribusi zakat fitrah berbagai provinsi di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Sumatra. Pada tahun 2020 hingga 2022, terlihat bahwa Aceh menduduki posisi teratas dalam pengumpulan zakat fitrah. Dengan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, Aceh menunjukkan komitmen yang kuat dalam berzakat, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor budaya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial. Di sisi lain, Lampung tercatat sebagai provinsi dengan jumlah zakat fitrah terendah selama periode yang sama. Posisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Lampung mengenai praktik zakat, serta potensi untuk memperbaiki pengelolaan dan distribusi zakat di daerah tersebut. Upaya untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat di Lampung perlu diperkuat agar dapat mengejar ketertinggalan dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatra.



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Tahun 2024

**Gambar 1.7 Zakat Mal Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatra, Tahun 2020-2022**

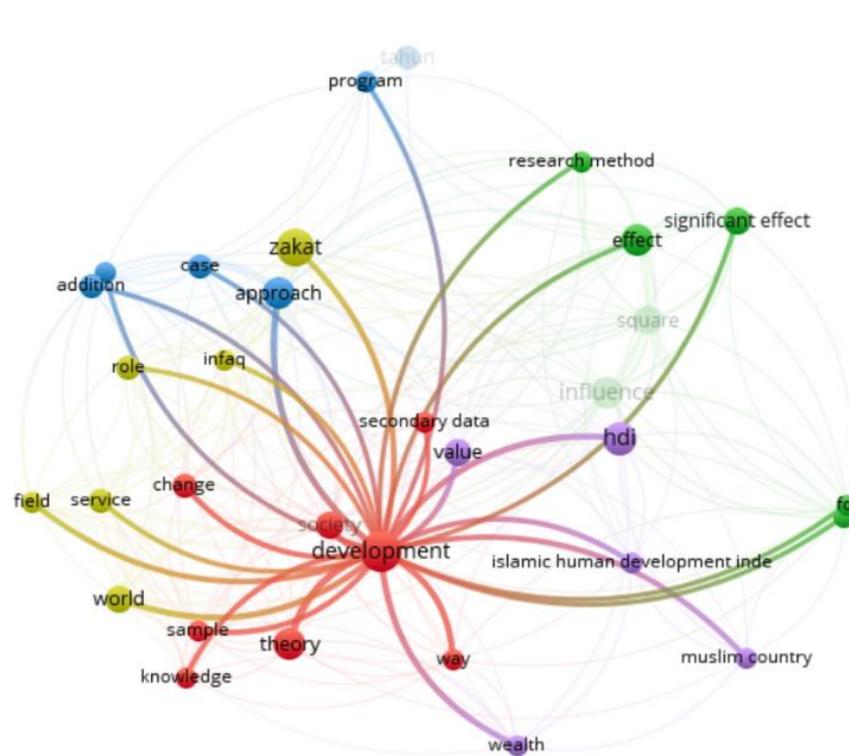
Gambar 1.7 menunjukkan grafik terkait distribusi zakat mal berbagai provinsi di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Sumatra. Berdasarkan grafik Zakat Mal di Pulau Sumatra dari tahun 2020 hingga 2022, Aceh menjadi provinsi dengan pengumpulan zakat mal tertinggi. Angka yang signifikan menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki kesadaran yang tinggi dalam berzakat, yang mungkin dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai agama yang kental di daerah tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen masyarakat Aceh terhadap tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Sebaliknya, Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan angka zakat mal terendah selama periode yang sama. Posisi ini menandakan adanya tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat, sertanya perlunya upaya edukasi yang lebih intensif untuk

menyadarkan warga tentang pentingnya zakat mal. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengelolaan zakat, diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung untuk berkontribusi lebih dalam pengumpulan zakat mal di masa mendatang.

Meskipun telah menunjukkan perkembangan positif, potensi zakat di Indonesia dan Sumatra masih jauh dari optimal. Penelitian BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp. 327 triliun per tahun, sementara realisasi penghimpunan zakat saat ini baru mencapai sekitar 4% dari potensinya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang yang luas untuk meningkatkan pengelolaan zakat di masa yang akan datang yang diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Di masa yang akan datang, integrasi zakat dengan sistem keuangan dan ekonomi nasional menjadi agenda penting. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat yang pada gilirannya akan berkontribusi lebih besar terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Indonesia termasuk wilayah Sumatra.

Studi yang dilakukan oleh Hendri Anto (2011), Adel Sarea (2012), Syad dkk (2019), dan Dinia dkk (2024) menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Asutay (2007), Yusoff 2011, Khasandy dan Badrudin 2019, dan Djafri dkk 2024 tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara zakat terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan Islam. Ketidakkonsistenan temuan ini

kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam metodologi penelitian, metode pengumpulan data, dan konteks spesifik dari studi tersebut.



Sumber: Data Diolah, Tahun 2024

**Gambar 1. 8 Pemetaan Vosviewer Development**

Gambar 1.8 adalah peta jaringan konsep yang menggambarkan keterkaitan antara tema-tema yang berhubungan dengan judul penelitian "Pengaruh Kinerja Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Penerimaan Zakat yang Dimediasi oleh Kesejahteraan Islam (Islamic Human Development Index atau I-HDI) di Sumatra." Dalam peta konsep ini, "zakat" menjadi pusat dari berbagai konsep lain, mencerminkan peran penting zakat dalam mengatasi masalah kinerja ekonomi dan kemiskinan serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat Muslim di Sumatra. Konsep-konsep yang dikelompokkan dalam beberapa warna menunjukkan pembagian tema yang berhubungan dengan variabel

utama penelitian, yaitu kinerja ekonomi, kemiskinan, kesejahteraan berbasis Islam (I-HDI), dan dampaknya terhadap penerimaan zakat.

Beberapa kelompok warna dalam peta ini membantu menggambarkan fokus penelitian. Misalnya, kelompok hijau mencakup istilah-istilah seperti "research method," "significant effect," dan "influence," yang menggambarkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian untuk mengukur pengaruh kinerja ekonomi dan kemiskinan terhadap zakat serta signifikan atau tidaknya pengaruh tersebut. Referensi dari Beik (2009 yang mengembangkan konsep Islamic Human Development Index (I-HDI) dapat dijadikan acuan dalam mengukur kesejahteraan Islam sebagai variabel mediasi yang menjelaskan bagaimana kesejahteraan Islam berperan dalam hubungan antara kinerja ekonomi dan penerimaan zakat.

Kelompok ungu dengan istilah "hdi" dan "islamic human development index" (I-HDI) menyoroti bahwa kesejahteraan Islami digunakan sebagai variabel mediasi. Penelitian sebelumnya oleh Firdaus, Beik, & Irawan (2012) yang mengeksplorasi potensi penerimaan zakat di Indonesia relevan untuk memahami bagaimana zakat dapat dipengaruhi oleh indikator ekonomi dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan Islami, di mana zakat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan I-HDI dan kesejahteraan di wilayah Sumatra, sesuai dengan pandangan Chapra (2008) tentang pembangunan ekonomi Islami.

Kelompok merah yang mencakup istilah seperti "development," "theory," dan "change" menunjukkan adanya landasan teoretis dan tujuan untuk mempelajari perubahan sosial dalam masyarakat. Kahf (2004) dalam penelitiannya tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan memberikan landasan teori tentang bagaimana zakat dapat

menjadi faktor perubahan sosial dan ekonomi, yang relevan dalam konteks Sumatra, di mana penerimaan zakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kata-kata seperti "field," "role," dan "infaq" menunjukkan pendekatan zakat sebagai solusi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmed (2004) yang menyebutkan peran zakat dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

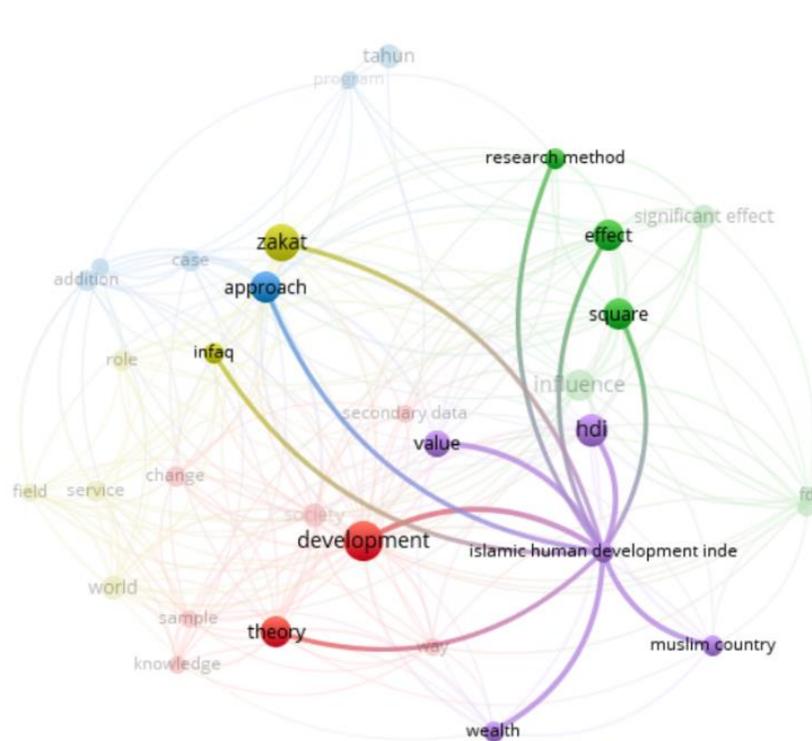
Peta jaringan ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya mengamati dampak langsung kinerja ekonomi dan kemiskinan terhadap penerimaan zakat, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan berbasis Islam (I-HDI) sebagai mediator. Dengan demikian, konsep I-HDI ini membantu menjelaskan mengapa penerimaan zakat mungkin berbeda-beda bergantung pada tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Sadeq (1997) dalam pendekatan Islam terhadap pengentasan kemiskinan.

Gambar ini menampilkan peta konsep yang menggambarkan peran sentral dari indeks pembangunan manusia Islam (I-HDI) sebagai mediator kunci dalam hubungan antara berbagai variabel independen, seperti kinerja ekonomi dan kemiskinan, dengan variabel dependen yaitu penerimaan zakat. I-HDI diukur menggunakan pendekatan yang merefleksikan elemen-elemen penting seperti kekayaan, pengaruh sosial, dan pengukuran pembangunan manusia dalam konteks Islam. Peta konsep ini juga menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai indikator kinerja ekonomi sekaligus alat untuk mengatasi kemiskinan, dengan pendekatan evaluasi yang terintegrasi dengan variabel lainnya. Selanjutnya, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis kuantitatif, tetapi juga menawarkan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep I-HDI yang memadukan indikator pembangunan manusia dengan nilai-nilai Islam. Konteks lokal di wilayah

Sumatra memberikan gambaran spesifik mengenai penerapan zakat dan indikator kesejahteraan Islam dalam mengukur dampak ekonomi pada daerah dengan mayoritas penduduk Muslim.

Penelitian ini sejalan dengan studi-studi terkini yang membahas kaitan antara zakat, kemiskinan, dan pembangunan manusia berbasis Islam. Beberapa penelitian tersebut diantaranya (Kahfi et al., 2024), (Al-Jayyousi et al., 2023).

Sebagai instrumen utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Sumatra, penelitian ini menganalisis bagaimana kinerja ekonomi dan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut memengaruhi penerimaan zakat, serta peran I-HDI sebagai variabel mediasi dalam mengukur kesejahteraan berbasis Islam.



Sumber: Data Diolah, Tahun 2024

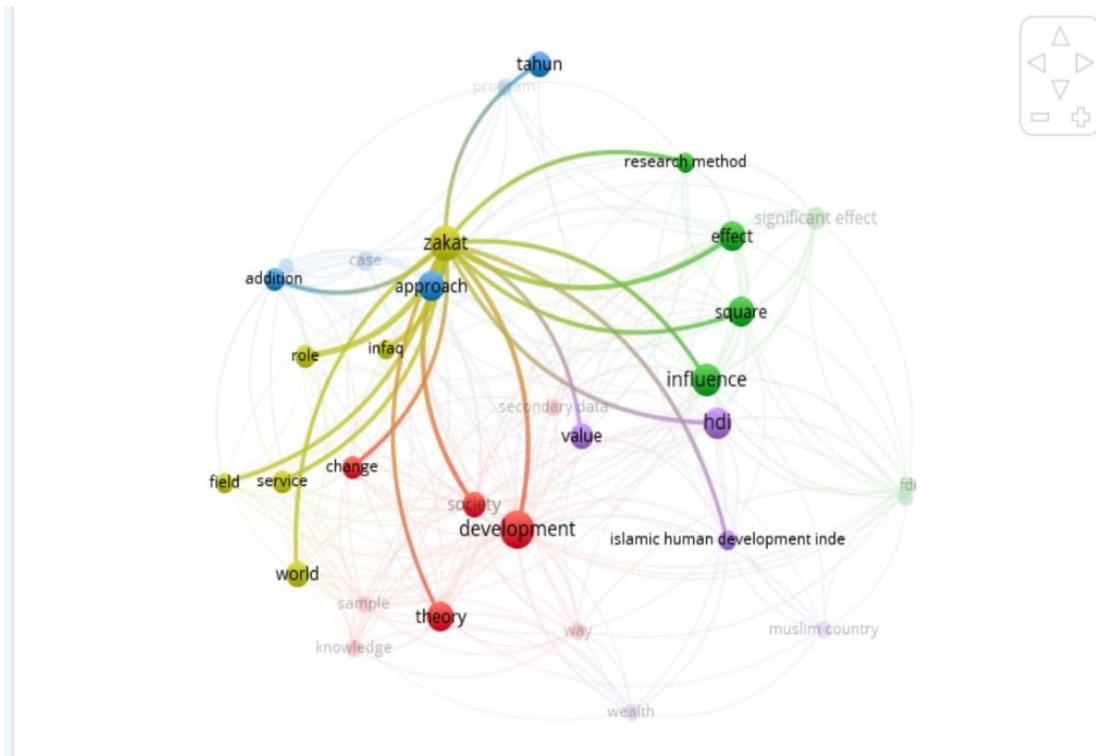
**Gambar 1. 9 Pemetaan Vosviewer IHDI**

Beberapa kelompok konsep dalam peta 1.9 ini mencerminkan tema yang berkaitan langsung dengan variabel utama dari penelitian ini. Kelompok berwarna hijau, yang mencakup istilah seperti “metode penelitian,” “efek,” dan “pengaruh,” menunjukkan bahwa penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif serta metode penelitian yang terstruktur untuk mengukur dampak kinerja ekonomi dan kemiskinan terhadap zakat. Penelitian terbaru oleh Abdullah et al., (2022) mendukung pendekatan ini dengan menunjukkan bagaimana metodologi kuantitatif dapat memberikan bukti empiris yang kuat dalam analisis hubungan antara indikator ekonomi dan kesejahteraan berbasis Islam. Selanjutnya, kelompok konsep berwarna ungu menekankan istilah seperti “hdi” dan “indeks pembangunan manusia Islam” (I-HDI), yang berfungsi sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini. I-HDI, sebagai indikator kesejahteraan Islami, digunakan untuk menilai sejauh mana zakat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut penelitian terbaru oleh Hasbi, (2023), I-HDI terbukti menjadi alat yang efektif dalam mengevaluasi dampak zakat terhadap kesejahteraan umat Islam, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dengan demikian, I-HDI menyediakan kerangka yang relevan untuk mengukur kesejahteraan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai Islami.

Selain itu, kelompok berwarna merah yang mencakup istilah seperti “pembangunan,” “teori,” dan “perubahan” menunjukkan bahwa penelitian ini berlandaskan pada teori pembangunan Islam, yang memandang zakat sebagai instrumen sosial yang mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Teori ini sejalan dengan pandangan Haerunnisa et al., (2023), yang menekankan pentingnya zakat tidak hanya dalam mengurangi kemiskinan, tetapi juga dalam mempromosikan keadilan sosial dan

keseimbangan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat Muslim, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kelompok berwarna kuning yang mencakup istilah seperti “peran” dan “infaq” menunjukkan bahwa zakat, bersama dengan infaq, memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anjelina et al., (2020) menjelaskan bahwa zakat dan infaq tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan manusia yang berkelanjutan dalam perspektif Islam. Hal ini sejalan dengan konsep yang ditampilkan dalam peta, di mana zakat dianggap sebagai bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Sumatera.



Sumber: Data Diolah, Tahun 2024

**Gambar 1. 10 Pemetaan Vosviewer Zakat**

Gambar 1.10 merupakan pemetaan konsep zakat. Dalam peta konsep ini, "zakat" menempati posisi sentral, mencerminkan perannya yang penting dalam mengatasi masalah kinerja ekonomi dan kemiskinan, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat Muslim di Sumatra. Konsep-konsep yang di kelompokkan berdasarkan warna menunjukkan pembagian tema yang terkait dengan variabel utama penelitian, yaitu kinerja ekonomi, kemiskinan, kesejahteraan berbasis Islam (I-HDI), dan dampaknya terhadap penerimaan zakat. Kelompok warna hijau mencakup istilah-istilah seperti "metode penelitian," "efek signifikan," dan "pengaruh," yang menggambarkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian untuk mengukur pengaruh kinerja ekonomi dan kemiskinan terhadap zakat, serta signifikansi dari pengaruh tersebut. Referensi dari Beik et al., (2016) yang mengembangkan konsep Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) dapat dijadikan acuan dalam mengukur kesejahteraan Islam sebagai variabel mediasi yang menjelaskan bagaimana kesejahteraan Islam berperan dalam hubungan antara kinerja ekonomi dan penerimaan zakat.

Kelompok konsep berwarna ungu, yang mencakup istilah "hdi" dan "indeks pembangunan manusia Islam" (I-HDI), menyoroti bahwa kesejahteraan Islami digunakan sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya oleh (Beik & Irawan, 2012) yang mengeksplorasi potensi penerimaan zakat di Indonesia menjadi relevan untuk memahami bagaimana zakat dapat dipengaruhi oleh indikator ekonomi dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan Islami, di mana zakat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan I-HDI dan kesejahteraan di wilayah Sumatra, sesuai dengan pandangan Chapra (2008) tentang pembangunan ekonomi Islami. Kelompok konsep berwarna merah yang mencakup istilah seperti

"pembangunan," "teori," dan "perubahan" menunjukkan adanya landasan teoretis dan tujuan untuk mempelajari perubahan sosial dalam masyarakat. Kahf (2004) dalam penelitiannya tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan memberikan dasar teori tentang bagaimana zakat dapat menjadi faktor perubahan sosial dan ekonomi, yang relevan dalam konteks Sumatra, di mana penerimaan zakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kata-kata seperti "lapangan," "peran," dan "infaq" menunjukkan pendekatan zakat sebagai solusi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmed (2004) yang menyebutkan peran zakat dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Peta jaringan ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya mengamati dampak langsung kinerja ekonomi dan kemiskinan terhadap penerimaan zakat, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan berbasis Islam I-HDI sebagai mediator. Dengan demikian, konsep I-HDI ini membantu menjelaskan mengapa penerimaan zakat mungkin berbeda-beda bergantung pada tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh (Sadeq, 1997) dalam pendekatan Islam terhadap pengentasan kemiskinan. Secara keseluruhan, gambar ini memberikan pemahaman visual tentang interaksi antara kinerja ekonomi, kemiskinan, zakat, dan I-HDI. Dengan menggunakan referensi-referensi yang relevan, penelitian ini dapat memahami peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Sumatra melalui pendekatan ekonomi Islam yang terpadu.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan ini dan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran zakat dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat Islam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kinerja ekonomi terhadap kesejahteraan Islam?
2. Bagaimana pengaruh kinerja ekonomi terhadap zakat?
3. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap kesejahteraan Islam?
4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap zakat?
5. Bagaimana pengaruh kesejahteraan Islam terhadap zakat?
6. Bagaimana pengaruh kinerja ekonomi terhadap kesejahteraan Islam dan selanjutnya terhadap zakat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja ekonomi terhadap kesejahteraan Islam.
2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja ekonomi terhadap zakat.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap kesejahteraan Islam.
4. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap zakat.
5. Untuk mengetahui pengaruh kesejahteraan Islam terhadap zakat.
6. Untuk mengetahui pengaruh kinerja ekonomi terhadap kesejahteraan Islam dan selanjutnya terhadap zakat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai zakat, kinerja ekonomi, kemiskinan, dan pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan antara indikator ekonomi, sosial, dan penerimaan zakat.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang berguna bagi lembaga-lembaga pengelola zakat di Sumatra dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan zakat, sehingga dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
2. Membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan penerimaan zakat dan mengurangi kemiskinan di wilayah Sumatra.
3. Memberikan wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia berkelanjutan dari sudut pandang Islam.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan, konsep-konsep, teori-teori dan dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan Islam khususnya ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah,

dan Pemerataan pembangunan ekonomi antara daerah di Setiap Provinsi yang ada di Pulau Sumatra.

2. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan untuk perencanaan pembangunan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang berada di Pulau Sumatra. Menambah studi kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca
3. Pengolahan data yang dilakukan dan metode yang digunakan yaitu :Indeks Williamson untuk menguji dan memberikan bukti empiris dengan cara mengukur derajat ketimpangan antarwilayah berdasarkan PDRB perkapita, Penerimaan dan Penyaluran Zakat. Mendapatkan angka Disparitas Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar Provinsi di Sumatra tahun 2011 sampai dengan tahun 2021.